

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan *influencer* dalam upaya produksi narasi "Ajakan Damai Indonesia" pada aksi penolakan tunjangan DPR RI Agustus–September 2025 merupakan bagian dari operasi *computational propaganda* yang terstruktur, melibatkan mekanisme rekrutmen yang sistematis, karakteristik narasi yang dirancang untuk mengeksploitasi algoritma *platform*, serta dinamika resistensi yang pada akhirnya menggagalkan eksekusi narasi tersebut. Meskipun konten "Ajakan Damai Indonesia" tidak sempat dipublikasikan, seluruh tahapan perencanaan yang telah berjalan sudah cukup untuk mengategorikan fenomena ini sebagai satu rangkaian operasi *cyber troops* yang utuh, sekaligus memperlihatkan bahwa *influencer* menempati posisi strategis dalam ekosistem politik digital Indonesia kontemporer.

Mekanisme rekrutmen *influencer* dalam operasi narasi "Ajakan Damai Indonesia" berlangsung melalui struktur komisioning tiga lapis yang melibatkan klien sebagai pemberi perintah, agensi sebagai *coordinator*, serta *influencer* sebagai pelaksana di lapangan. Agensi menjalankan fungsi koordinasi yang melampaui peran perantara pasif, yakni menerjemahkan kepentingan klien menjadi instruksi operasional yang konkret sekaligus menciptakan jarak yang menghasilkan *plausible deniability* bagi pihak klien. Instruksi tersebut dikemas dalam *brief* yang memuat ketentuan teknis terperinci, mulai dari narasi, jadwal tayang, *hashtag*, hingga besaran *fee* yang disesuaikan dengan jangkauan audiens masing-masing *influencer*. Pemilihan *influencer* sebagai target rekrutmen yang diprioritaskan juga bukan kebetulan, melainkan mencerminkan pergeseran strategis dalam ekosistem *cyber troops* Indonesia dari penggunaan akun anonim menuju aktor yang memiliki identitas publik dan kepercayaan audiens yang terbangun secara organik, karena kapasitas legitimasi itulah yang tidak dapat direplikasi oleh *buzzer* maupun *bot*.

Operasi narasi "Ajakan Damai Indonesia" memperlihatkan tiga dimensi *computational propaganda* yang bekerja secara bersamaan. Pertama, pemanfaatan algoritma *platform* melalui instruksi penayangan konten secara serentak dan

penggunaan *hashtag* yang seragam, yang dirancang untuk mendorong konten masuk ke dalam mekanisme *trending topic* seolah-olah mencerminkan gelombang opini yang organik. Kedua, penggunaan *influencer* sebagai *human curation* yang memberikan sentuhan personal dan emosional pada narasi yang sesungguhnya diproduksi secara terpusat, sehingga pesan yang bersifat terkoordinasi dapat tampil autentik di hadapan audiens yang tersegmentasi. Ketiga, konstruksi *framing* "damai" yang secara linguistik tampak netral namun secara politis berfungsi sebagai instrumen distorsi simbolik, yakni menggeser bingkai konflik dari relasi vertikal antara rakyat dan kebijakan negara menjadi seruan rekonsiliasi horizontal yang tidak memiliki *anchor* dalam realitas sosial yang dirasakan publik. Konvergensi antara *framing* institusi negara dan *brief* komisioning kepada *influencer* yang muncul dalam rentang waktu hampir bersamaan juga mengindikasikan bahwa operasi ini bukan produk dari satu rantai komisioning yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari respons komunikasi yang lebih terkoordinasi, dengan indikasi keterlibatan aktor yang memiliki akses terhadap sumber daya kelembagaan negara.

Dinamika resistensi yang ditunjukkan oleh sejumlah *influencer* dalam merespons tawaran komisioning memperlihatkan kompleksitas yang melampaui sekadar pembagian antara penerimaan dan penolakan. Pembongkaran tawaran ke ruang publik yang dilakukan oleh Jerome Polin, Vincent Liyanto, dan Hirotada Radifan merupakan bentuk resistensi aktif yang didorong oleh kesadaran etis dan pertimbangan reputasional, dan tindakan tersebut berhasil menggagalkan eksekusi operasi sebelum sempat memasuki tahap amplifikasi. Namun pembongkaran tersebut juga meninggalkan dampak residual yang tidak sepenuhnya positif, berupa erosi kepercayaan publik yang menyebar secara tidak selektif ke seluruh ekosistem *influencer*, munculnya narasi pendiskreditan yang menyerang kreator kritis tanpa membedakan antara yang dikomisi dan yang independen, serta pertanyaan yang belum terjawab tentang kalkulasi di balik tindakan pembongkaran itu sendiri. Kondisi ini memperlihatkan bahwa resistensi individual, meskipun berhasil menggagalkan satu operasi, tidak cukup untuk mengatasi dampak struktural yang lebih panjang yang ditinggalkan oleh keberadaan ekosistem komisioning narasi semacam ini.

Secara lebih luas, fenomena operasi narasi "Ajakan Damai Indonesia" mencerminkan kondisi struktural yang lebih dalam dalam ekosistem politik digital Indonesia. Komodifikasi opini publik melalui mekanisme komisioning narasi, ketimpangan struktural antara aktor yang memiliki sumber daya finansial besar dan masyarakat sipil yang bersuara secara mandiri, mekanisme kooptasi dan stigmatisasi yang bekerja secara berlapis terhadap suara-suara kritis, serta absennya regulasi yang secara tegas melarang praktik pasukan siber, secara bersama-sama membentuk ekosistem di mana ruang digital tidak lagi berfungsi sebagai arena pertukaran gagasan yang setara melainkan sebagai medan persaingan narasi yang timpang. Kasus ini mempertegas bahwa tantangan yang dihadapi oleh demokrasi digital Indonesia bersifat sistemik dan tidak dapat diselesaikan semata melalui resistensi individual para *influencer*, melainkan membutuhkan respons yang lebih komprehensif, mulai dari penguatan regulasi terhadap praktik komisioning narasi politik, peningkatan literasi digital publik, hingga pembangunan ekosistem informasi yang lebih akuntabel dan transparan.

5.2 Saran

Saran Akademis

1. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji lebih dalam terkait rantai *cyber troops* di Indonesia beserta jaringan agensi yang menaunginya, mengingat penelitian ini baru menyentuh permukaan struktur komisioning tersebut.
2. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji peran *buzzer* secara lebih mendalam dalam struktur *cyber troops*, mengingat penelitian ini hanya berfokus pada *influencer* dan tidak menemukan keterlibatan *buzzer* secara eksplisit dalam kasus "Ajakan Damai Indonesia".
3. Kajian mendatang dapat memperluas objek penelitian pada operasi narasi serupa di momentum politik lain, guna melihat apakah pola rekrutmen dan resistensi *influencer* yang ditemukan bersifat konsisten atau situasional.

Saran Praktis

1. Pembuat kebijakan disarankan untuk merumuskan regulasi yang lebih tegas dalam mengatur praktik komisioning narasi politik kepada pasukan siber, dibandingkan regulasi yang justru membatasi ruang bicara *influencer*.

2. Diperlukan regulasi perlindungan bagi *whistleblower*, termasuk *influencer*, yang mengungkapkan praktik komisioning narasi politik ke publik, agar tindakan transparansi tidak membawa risiko bagi pihak yang bersuara.
3. Lembaga pemerintahan disarankan memaksimalkan fungsi kehumasan sebagai alat komunikasi politik publik di ruang digital, sehingga kebutuhan membangun narasi tidak bergantung pada praktik komisioning kepada aktor non-formal seperti *influencer*.